

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
SATPOL P3KP KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA PEKALONGAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan di atas, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempumaan penyusunan laporan tahun yang akan datang.

Pekalongan, 20 Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680709 199003 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen (Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan).

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan *clean government* dan *good governance*, maka AKIP disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 3 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran-sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2023.

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2023, tetapi juga memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis pengukuran kinerja yang ada didalam LKjIP tersebut diharapkan segenap *stakeholders* di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama guna perbaikan penyelenggaraan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan di tahun-tahun selanjutnya.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan pada tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) (Nama Perangkat Daerah) , adalah sebagai berikut:

1. Indikator nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 73.
Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2023 nilai SAKIP Satpol P3KP 74,00 dengan katagori BB predikat Sangat Baik. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 101,37%.
2. Indikator persentase penanganan bencana kebakaran target yang ditetapkan 100%. Indikator ini dicapai dengan menghitung Jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibanding jumlah bencana kebakaran, selama tahun 2023 terjadi kebakaran sebanyak 109 kali dan jumlah kebakaran yang tertangani juga sebanyak 109 kali, sehingga tercapai 100%.
3. Indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan target yang tlah ditetapkan adalah 70% dan realisasi 82,41% maka capaian indikator adalah 117,73%. Indikator ini dicapai dengan menghitung rata-rata dari capaian persentase jumlah kebutuhan SOP, Jenis Sarpras Satpol PP, Jumlah anggota Satpol PP dan Salinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan jumlah warga negara yang terkena dampak akibat pelaksanaan penegakan Perda.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Satpol P3KP Kota Pekalongan dalam mencapai tujuan organisasi antara lain yaitu:

- 1) Kurangnya koordinasi OPD, Stakeholder dan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota guna efektivitas pelaksanaan penegakan Perda;
- 2) Kurangnya optimalisasi Pemberdayaan PPNS di Kota Pekalongan;
- 3) Kurangnya koordinasi secara lebih intensif dengan OPD terkait mengampu aset milik Pemerintah Kota Pekalongan berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan para pelanggar perda dan pemasangan tanda larangan;
- 4) Kurangnya koordinasi dan konsolidasi antara Provinsi dan Kabupaten /Kota dalam pelaksanaan Pengendalian dan Penanganan Tibumtranmas;
- 5) Kurangnya sinergitas antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menangani permasalahan Tibumtranmas;
- 6) Tidak adanya kesamaan persepsi antara Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jawa Tengah dengan Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam penanganan permasalahan Tibumtranmas di Masyarakat;
- 7) Kurangnya perhatian terhadap kapasitas dan kesejahteraan KST;
- 8) Kurang optimalnya pengembangan Kawasan tertib di wilayah Kota Pekalongan;

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut diatas Satpol P3KP Kota Pekalongan mengoptimalkan sistem manajemen kinerja organisasi dan meningkatkan koordinasi antar sektor dalam hal mendukung terciptanya ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Dan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang anatar lain dengan tertus menerus merencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan pencapaian indikator kinerja utama organisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG.....	2
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.3 KONDISI APARATUR.....	6
1.4 ISU STRATEGIS	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1 RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026	9
2.2 PERJANJIAN KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1 PENGUKURAN KINERJA	13
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	17
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	34
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH	36
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023	
- Indikator Kinerja Utama 2021-2026	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13), Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat. Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan mempunyai fungsi:

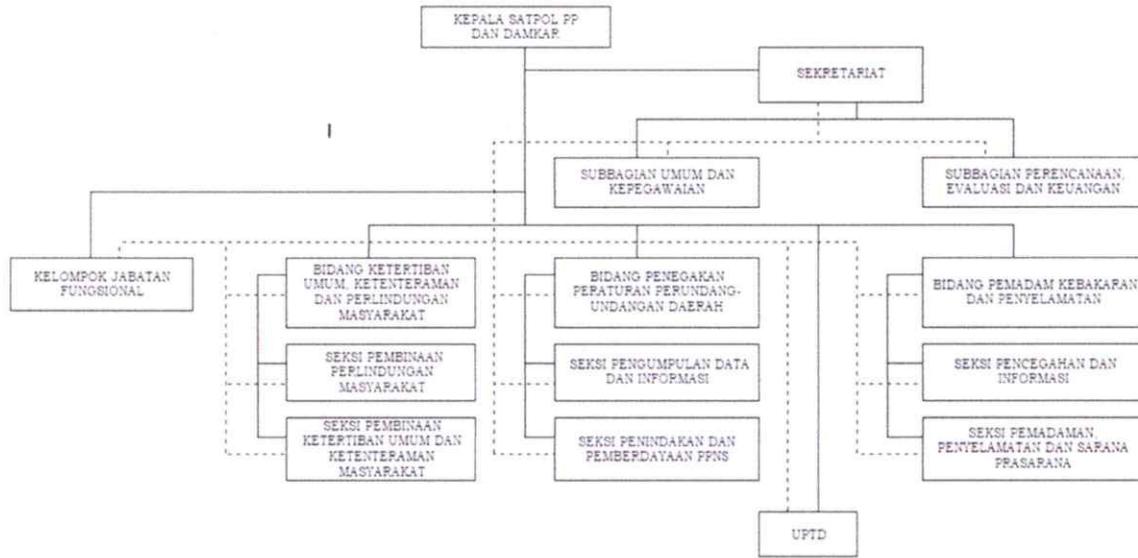
- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- b. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
- c. penyelenggaraan kebijakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat
- e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah
- f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan
- h. penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kebakaran
- i. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP)
- j. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam susunan organisasi dibawah ini:

- a. Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b. Sekretariat
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat
 - 1. Seksi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
 - 1. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi
 - 2. Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 1. Seksi Pencegahan dan Informasi
 - 2. Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Bagan Organisasi Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan



1.3 KONDISI APARATUR

Jumlah pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan per 31 Desember 2023, tercatat sebanyak 182 orang terdiri dari 38 orang PNS dan 144 orang Non PNS. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan diuraikan sebagai berikut:

1. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	Sarjana Muda	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat			7		10	1		18
2	Ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	2	3	90	9	13	1		118
3	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah			3		3	2		8
4	Pemadam kebakaran dan penyelamatan	1	6	24	1	4	2		38
	Jumlah (Orang)	3	9	124	10	30	6		182
	Persentase (%)	2,3	4,9	68	5,4	16,4	3,2		100

2. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Satpol P3KP Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	6	12	18
2	Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	114	4	118
3	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	5	3	8
4	Pemadam kebakaran dan penyelamatan	33	5	38
Total (orang)		158	24	182
Persentase (%)		86,81	13,19	100

3. Pegawai berdasarkan golongan

Komposisi pegawai di Satpol P3KP Kota Pekalongan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Satpol P3KP Kota Pekalongan
Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan				Non PNS	Total (Orang)
		I	II	III	IV		
1	Sekretariat		1	3	2	12	18
2	Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat	1	10	4	1	102	118
3	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah			1	2	5	8
4	Pemadam kebakaran dan penyelamatan	1	5	7		25	38
Total (orang)		2	16	15	5	144	182
Persentase (%)		1,09	8,7	8,2	2,7	79,12	100

1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masih terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. Masih adanya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
3. Masih minimnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Belum maksimalnya koordinasi yang terpadu antara Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum di Kota Pekalongan;
5. Masih adanya permasalahan ketentraman dan ketertiban yang tidak mempunyai payung hukum dalam penindakannya;
6. Masih munculnya respon negatif terhadap kinerja Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di masyarakat;
7. Makin terbukanya gerbang informasi melalui berbagai media yang menyebabkan terjadinya perubahan pola cara pandang masyarakat dalam menyikapi sesuatu perubahan terutama informasi-informasi negatif yang merusak norma, agama dan budaya;
8. Belum maksimalnya pembinaan dan pengembangan kapasitas dan kualitas SDM personil Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan PPNS maupun Damkar sesuai dengan pelaksanaan tugasnya.
9. Belum lengkapnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016–2021 dan dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran pada
Satuan Polisi Pamog Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD
		Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran
Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM

Adapun target kinerja sasaran Satpol P3KP sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Target Sasaran Kinerja Satpol P3KP
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	70	71,50	73	74,50	76	77,50
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	50	60	70	80	90	100

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Satpol P3KP

No	Sasaran	Indikator	2023	
			Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	70

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya

Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan

realokasi sumber daya jika diperlukan.

➤ Arahan Operasional

Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ Akuntabilitas

Membantu dinas dan seluruh organisasi dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ Perencanaan

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ Pengelolaan

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ Penganggaran

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ Penyediaan pelayanan kepada pihak luar

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ Pengawasan Kerja

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

- Sangat Berhasil : 95
- Berhasil : 82.5
- Cukup Berhasil : 70
- Tidak Berhasil : 57.5
- Sangat Tidak Berhasil : 25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	73	74	101,37	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	70	82,41	117,73	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama, dapat dilihat tingkat pencapaian sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 73.

Berdasarkan penilaian SAKIP Satpol P3KP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, hasil penilaian AKIP Satpol P3KP Tahun 2023 adalah 74 dengan kategori BB predikat Sangat Baik. Sehingga apabila dibandingkan dengan target Nilai Sakip Satpol P3KP Tahun 2023 yaitu 73 maka capaian untuk indikator Nilai Sakip OPD sebesar 101,37 persen.

2. Indikator persentase penanganan bencana kebakaran dengan target 100 persen dan realisasi 100 persen maka tingkat capaian indikator 100 persen. Capaian tersebut dapat dilihat dari jumlah kebakaran yang terjadi dan dilaporkan dapat ditindak lanjuti dan ditangani seluruhnya oleh Satpol P3KP Kota Pekalongan, dimana pada tahun 2023 sebanyak 109 kali kebakaran yang terjadi di Kota Pekalongan dan sekitarnya.
3. Indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan target 70 persen dan realisasi 82,41 persen maka tingkat capaian 117,73 persen. Indikator ini diukur dengan menghitung capaian masing-masing SPM yaitu adanya SOP, adanya sarana dan prasarana Satpol PP, terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas, dan terlaksananya penggantian rugi dan/atau pengobatan kepada masyarakat yang terkena dampak pelaksanaan penegakan Perda.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,47	73,80	74	▲
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	●
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	-	82,40	82,41	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Dokumen Rencana Strategis atau Renstra didalamnya memuat target kinerja termasuk indikator kinerja utama. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada dokumen renstra adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2023 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2023	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	74	77,50	95,48	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	82,41	100	82,41	Berhasil

Realisasi capaian kinerja utama Satpol P3KP Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, untuk indikator nilai SAKIP OPD dimana capaian 95,48% dengan kategori sangat berhasil. Indikator kedua persentase penanganan bencana kebakaran dimana capaian 100% dengan kategori sangat berhasil. Dan indikator ketiga persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan capaian 82,41% masuk kategori berhasil.

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,28	90	95,86	Sangat Berhasil
2	Menjamin Kepastian Hukum dan Ketertiban Umum	Tingkat ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	100	100	Sangat Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja tujuan, disimpulkan bahwa 2 indikator rata-rata tercapai 97,93% dikategorikan “Sangat Berhasil”.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran, dapat dianalisis masing-masing sasaran berdasarkan target dan realisasi kinerjanya. Adapun analisis capaian kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 101,37% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	65,95	Indeks	72,47	73,80	73	74	101,37	77,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2023. Hasil evaluasi AKIP Satpol P3KP Kota Pekalongan memperoleh nilai 74 atau predikat “Sangat Baik”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Satpol P3KP Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rincian Hasil Evaluasi AKIP
Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80
2	Pengukuran Kinerja	30	20,40
3	Pelaporan Kinerja	15	10,80
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	74
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Sangat Baik	

Tabel 3.8
Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
1	BAPPEDA	88,50
2	DINKOMINFO	87,60
3	SETDA	81,50
4	DINKES	82,15

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2023
5	DLH	86,05
6	INSPEKTORAT DAERAH	84,60
7	BPKAD	84,35
8	DINDAGKOP-UKM	85,45
9	DPUPR	84,45
10	DPMPPA	83,35
11	DISDUKCAPIL	82,60
12	DKP	83,05
13	BKPSDM	82,75
14	DINPARBUDPORA	77,55
15	DINDIK	78,00
16	DPMPTSP	77,60
17	DINHUB	76,10
18	DINARPUS	75,30
19	SEKRETARIAT DPRD	73,25
20	KEC. PEKALONGAN SELATAN	75,80
21	DINPERPA	75,75
22	BPBD	75,35
23	SATPOL P3KP	74,00
24	KEC. PEKALONGAN UTARA	74,30
25	KEC. PEKALONGAN BARAT	75,20
26	KEC. PEKALONGAN TIMUR	75,15
27	DINPERKIM	74,45
28	DINPERINAKER	74,70
29	DINSOS P2KB	74,40
30	BADAN KESBANGPOL	73,20

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran 1 Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.647.000,-	7.635.500,-
	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.260.934.000,-	3.979.951.470,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.500.000,-	14.750.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.881.000,-	237.735.100,-
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	131.620.000,-	120.191.576,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.550.000,-	395.730.466,-
TOTAL		5.112.132.000,-	4.755.994.112,-

Evaluasi Kinerja Sasaran 1 meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah terhadap realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 1 terhadap Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5.112.132.000,-	4.775.994.112,-	93,03	101,37	8,96

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 93,03% Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 101,37%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,96%.

Indikator kinerja sasaran 1 yaitu Nilai SAKIP OPD merupakan indikator kinerja mandiri Satpol P3KP Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Naional maupun Provinsi.

SASARAN 2 : Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase penanganan bencana kebakaran	100	Persen	100	100	100	100	100	100

Kejadian kebakaran pada tahun 2023 di Kota Pekalongan dan sekitarnya sebanyak 109 kali, dimana seluruhnya dapat ditangani oleh petugas pemadam kebakaran sehingga realisasi persentase penanganan bencana kebakaran 100%. Berikut laporan kejadian kebakaran pada tahun 2023:

Tabel 3.12
Laporan Kejadian Kebakaran di Kota Pekalongan Tahun 2023

NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	OBJEK TERBAKAR	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan
1	Rabu, 11 Januari 2023	Jl. Sunan Ampel No. 28 Rt 04/ Rw 03 Medono	Rumah	4
2	Sabtu, 28 Januari 2023	Kraton Kidul Gg. IX	Rumah	8
3	Selasa, 28 Febuari 2023	Jl. Progo depan SMA 3 PKL	Gerobak Mie	3
4	Senin, 6 Maret 2023	Jl. Wahid Hasyim Gg. 11 Noyontaan	Rumah	5
5	Kamis, 9 Maret 2023	Jl. Khm.Mansyur Depan Alfamart	Pohon	0
6	Kamis, 24 Maret 2023	Jl. Hasanudin No. 88 Kauman	Rumah	5
7	Senin, 27 Maret 2023	Jl. Jlamprang Klego Gg. 3 Rt 02/ Rw 08	Dapur Rumah	4
8	Sabtu, 15 April 2023	Kauman Barat Wiradesa Kab. PKL	Rumah	5
9	Minggu, 23 April 2023	Jl. Gajah Mada Tirto	Pal Gardu Listrik	0

NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	OBJEK TERBAKAR	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan
10	Minggu, 23 April 2023	Desa Tratebang Rt 11/ Rw 04	Lahan	0
11	Selasa, 25 April 2023	Pekajangan Gg. 26 Kedungwuni	Rumah	5
12	Selasa, 2 Mei 2023	Jl. Kalimantan Podosugih	Rumah Produksi pengrajin eceng gondog	7
13	Rabu, 17 Mei 2023	Kuripan Lor Gg. 8	Gudang Sperpart motor	5
14	Minggu, 21 Mei 2023	Podosugih Rt 02/ Rw 08	Lahan Kosong	0
15	Sabtu, 27 Mei 2023	Duwet Rt 01/ Rw 09 Sokoduwet	Rumah	7
16	Rabu, 31 Mei 2023	Masjid Darul Aqrom Desa Kampil	Masjid	Warga
17	Sabtu, 10 Juni 2023	Jl. Irian No. 70 Rt 01/ Rw 18	Cafee Jong Java	15
18	Minggu, 11 Juni 2023	Jl. Lestari Pringlangu	Lahan kosong	5
19	Rabu, 21 Juni 2023	Gg. Beringin Gembong Kedungwuni	Rumah	5
20	Sabtu, 24 Juni 2023	Jl. Ahmad Dahlan Perum Griya Inggil	Rumah	6
21	Sabtu, 24 Juni 2023	Jl. Seruni Rt 06/ Rw 01	Rumah	4
22	Senin, 26 Juni 2023	Mandiri Finance Alun- Alun	Kantor	9
23	Minggu, 2 Juli 2023	Jl. Perintis Kemerdekaan	Lahan Kosong	0
24	Minggu, 2 Juli 2023	Perumahan Permai Griya Panjang C2	Rumah	5
25	Kamis, 13 Juli 2023	Gg. Baru Rt 04/ Rw 02 Jenggot	Rumah	6
26	Sabtu, 15 Juli 2023	Pencongan Wiradesa	Pohon	0
27	Senin, 17 Juli 2023	Jl. Letjen Suprpto	Lahan Kosong	0
28	Kamis, 20 Juli 2023	Bendungan Kletak Wonopringgo	Lahan Kosong	0
29	Kamis, 27 Juli 2023	Pesindon Gg. 2 No. 7 Rt 03/ Rw 13	Rumah	0
30	Jum at, 28 Juli 2023	Jl. Jenggala Timur Kec. Pkl Barat	Lahan Kosong	0
31	Sabtu, 29 Juli 2023	Jl. Dr. Wahidin Noyontaan	(4) Ruko	12
32	Sabtu, 29 Juli 2023	Jenggot Gg. 1	Rumah	5
33	Sabtu, 29 Juli 2023	Jl. Gajah Mada Tirto	Lahan Kosong	0
34	Minggu, 30 Juli 2023	Noyontaan Belakang Ramayana	Lahan Kosong	0
35	Selasa, 1 Agustus 2023	Jl. Darmabakti Medono	Lahan Kosong	0
36	Selasa, 1 Agustus 2023	Lapangan Mako Brimob Kota Pekalongan	Lapangan	0

NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	OBJEK TERBAKAR	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan
37	Selasa, 1 Agustus 2023	Ex. Pasar Banjarsari Kota Pekalongan	Lahan Kosong	0
38	Selasa, 1 Agustus 2023	Kertoharjo Gg. 19	Gudang Layos/ Tratak	6
39	Minggu, 6 Agustus 2023	Jenggot Gg. Hasanudin	Lahan Kosong	0
40	Minggu, 6 Agustus 2023	Jenggot Setu Rt 01/ Rw 10	Gedung Sekolah	8
41	Rabu, 16 Agustus 2023	Pabean Perum Taman Griya Bahagia	Rumah	5
42	Selasa, 22 Agustus 2023	Pecongan, Perum Wira Baru	Lahan Kosong	0
43	Rabu, 23 Agustus 2023	Jl. Truntum Krpyak Krpyak Lor Gg.4	Lahan Kosong	0
44	Senin, 28 Agustus 2023	GOR Jetayu	Mobil hias	0
45	Selasa, 29 Agustus 2023	Jl. Jendral Sudirman depan SMP 13	Lahan Kosong	0
46	Rabu, 30 Agustus 2023	Kuripan Baru Rt 01/ Rw 03	Lahan Kosong	0
47	Jum at, 1 September 2023	Ex. Krasidenan Kota Pekalongan	Lahan Kosong	0
48	Sabtu, 2 September 2023	Jl. Truntum Krpyak	Lahan Kosong	0
49	Senin, 4 September 2023	Perum Citra Garden Panjang baru	Lahan Kosong	0
50	Senin, 4 September 2023	SMPN. 2 Siwalan	Lahan Kosong	0
51	Selasa, 5 September 2023	Gapura Ex. Kolam Renang Tirtasari	Gapura Ex. Kolam Renang Tirtasari	0
52	Selasa, 5 September 2023	Jl. Ahmad Yani Kec. Tirto	Lahan Kosong	0
53	Rabu, 6 September 2023	Kuripan Lor Gg. 4	Rumah	0
54	Rabu, 6 September 2023	Jl. Tondano Poncol	Lahan Kosong	0
55	Rabu, 6 September 2023	Belakang Rusunawa Slamiran	Lahan Kosong	0
56	Minggu, 10 September 2023	Sokoduwet	Lahan Kosong	0
57	Minggu, 10 September 2023	Belakang Koodim 0710	Lahan Kosong	0

NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	OBJEK TERBAKAR	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan
58	Senin, 11 September 2023	Jl. Cendrawasih	Lahan Kosong	0
59	Kamis, 14 September 2023	Duwet Rt 01/ Rw 06 Sokoduwet	Lahan Bambu	0
60	Sabtu, 16 September 2023	Kandang Panjang Gg. 5	Lahan Kosong	0
61	Minggu, 17 September 2023	TPA Banyurip	TPA Banyurip	0
62	Rabu, 20 September 2023	Jl. Raya Capgawen	Ruko	7
63	Sabtu, 23 September 2023	Jl. Mulia No. 77 Padukuhan Kraton	Rumah	15
64	Sabtu, 23 September 2023	Jl. Kusuma Bangsa Gg. 3 pahlawan	Lahan Kosong	0
65	Minggu, 24 September 2023	PT. Kabana	Lahan Kosong	0
66	Senin, 25 September 2023	Jl. Sultan Syahrir Gg. 11 Rt 005/ Rw 003	Lahan Kosong	0
67	Selasa, 26 September 2023	Jl. Lestari Pringrejo	Lahan Kosong	0
68	Rabu, 27 September 2023	Belakang Gedung Bakorwil/ Jetayu	Lahan Kosong	0
69	Rabu, 27 September 2023	Kergon	Dapur rumah	5
70	Kamis, 28 September 2023	Jl. Sriwijaya samping gedung KPU	Lahan Kosong	0
71	Kamis, 28 September 2023	Bong Cino Kuripan	Lahan Kosong	0
72	Jum at, 29 September 2023	Jl. Pelita III Gg. IV No. 10 Rt 001/ Rw 009	Rumah	0
73	Minggu, 1 Oktober 2023	BRD Kelurahan Pringrejo	Lahan Kosong	0
74	Minggu, 1 Oktober 2023	Komplek Makam Cino Kuripan	Lahan Kosong	0
75	Senin, 2 Oktober 2023	Jl. Sri Wedari Rt 002/ Rw 012 Poncol	Rumah	0
76	Senin, 2 Oktober 2023	Taman di Jl. Wilis	Lahan Kosong	0
77	Selasa, 3 Oktober 2023	Jl. Kemakmuran	Lahan Kosong	0
78	Selasa, 3 Oktober 2023	Jl. Kurinci Rt 006/ Rw 006	Dapur Rumah	5
79	Selasa, 3 Oktober 2023	Pondok Al Maliki Jenggot	Lahan Kosong	0

NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	OBJEK TERBAKAR	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan
80	Jum at, 6 Oktober 2023	SMPN. 9 Kota Pekalongan	Lahan Kosong	0
81	Sabtu, 7 Oktober 2023	Pabean	Rumah Produksi batik	10
82	Senin, 9 Oktober 2023	Jl. Pelita 5 Rt 002/ Rw 005 Kuripan Kertoharjo	Lahan Kosong	0
83	Selasa, 10 Oktober 2023	Desa Galih Kel. Dadirejo	Pabrik Tahu	15
84	Rabu, 11 Oktober 2023	Kalibaros	Lahan Kosong	0
85	Jum at, 13 Oktober 2023	Jl. AMD. Kramatsari	Lahan Kosong	0
86	Selasa, 17 Oktober 2023	Keputran Gg. 4	Lahan Kosong	0
87	Jum at, 20 Oktober 2023	Kawasan GOR Jetayu	Gedung GOR Jetayu	0
88	Jum at, 20 Oktober 2023	SD. Negeri Kandang Panjang 10	Lahan Kosong	0
89	Sabtu, 21 Oktober 2023	Jl. Darma Bakti Gg. 7	Lahan Kosong	0
90	Minggu, 22 Oktober 2023	Jl. WR. Supratman Gg. Hiu Rt 06/ Rw 13	Rumah	5
91	Senin, 23 Oktober 2023	Jl. Banger Utara 9 Depan SMP. N 10	Lahan Kosong	0
92	Selasa, 31 Oktober 2023	Depan Kelurahan Setono	Lahan Kosong	0
93	Rabu, 1 November 2023	Rusunawa Panjang Baru	Lahan Kosong	0
94	Rabu, 1 November 2023	Jl. Sriwijaya	Lahan Kosong	0
95	Jum at, 3 November 2023	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 16 Rt 05/ Rw 16	Rumah	5
96	Sabtu, 4 November 2023	Depan Pom Bensin Krapyak	Lahan Kosong	0
97	Kamis, 9 November 2023	Jl. Pantaisari I Rt 001/ Rw 13	Lahan Kosong	0
98	Sabtu, 11 November 2023	Jl. Pantaisari 2 No. 2	Lahan Kosong	0
99	Senin, 13 November 2023	Medono Gg. 6	Gudang barang-barang antik	7
100	Senin, 20 November 2023	Jl. Teuku Umar No. 43 Rt 03/ Rw 08	Lahan Kosong	0
101	Rabu, 29 November 2023	Jl. Kopi No. 604 Binagriya	Rumah	5

NO	HARI/ TANGGAL	ALAMAT KEBAKARAN	OBJEK TERBAKAR	Korban terdampak yang dievakuasi/ diselamatkan
102	Selasa, 12 Desember 2023	Puskesmas Klego	Puskesmas Klego	0
103	Selasa, 12 Desember 2023	Jl. Asem Binatur	Lahan Kosong	0
104	Kamis, 14 Desember 2023	Desa Kauman Kecamatan Wiradesa	Lahan Kosong	0
105	Sabtu, 16 Desember 2023	Pringrejo	Lahan Kosong	0
106	Minggu, 17 Desember 2023	TPS Belakang Puskesmas Jenggot	TPS	0
107	Minggu, 17 Desember 2023	Karangjomo Gg. Sengkuyung	Lahan Kosong	0
108	Kamis, 21 Desember 2023	Jl. Kh. Dewantoro Landungsari Gg. 22 Rt 04/ Rw 07	Rumah	6
109	Rabu, 27 Desember 2023	Jl. Gajahmada Barat Tirto	Rumah	5

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar petugas pemadam kebakaran dan relawan pemadam kebakaran;
- b. Adanya kesiapsiagaan anggota pemadam kebakaran dan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil pemadam kebakaran.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja Sasaran 2:

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran 2 Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	696.300.000,-	693.613.565,-
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25.000.000,-	25.000.000,-
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	74.403.000,-	73.818.000,-
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	72.282.000,-	72.280.500,-
Total		867.985.000,-	864.712.065,-

Evaluasi Kinerja Sasaran 2 meningkatnya penanganan bencana kebakaran terhadap realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 2 terhadap Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	867.985.000,-	864.712.065,-	99,62	100	0,38

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 99,62% Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,38%.

Indikator sasaran 2 yaitu persentase penanganan bencana kebakaran merupakan indikator kinerja mandiri Satpol P3KP Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

SASARAN 3 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	-	Persen	50	60	70	82,41	117,73	100

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM adalah 117,73%. Indikator ini dicapai dengan menghitung rata-rata dari capaian persentase jumlah kebutuhan SOP, Jenis Sarpras Satpol PP, Jumlah anggota Satpol PP dan Salinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan jumlah warga negara yang terkena dampak akibat pelaksanaan penegakan Perda.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 3 antara lain:

1. Kelengkapan dokumen SOP Satpol PP
2. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Satpol PP yang baik
3. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas

Capaian kinerja sasaran 3 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan program, kegiatan dan anggaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran 3 Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.024.041.000,-	3.023.866.000,-
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.329.470.000,-	4.296.479.529,-
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.900.000,-	1.900.000,-
Total		867.985.000,-	864.712.065,-

Evaluasi kinerja sasaran 3 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terhadap realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.17
Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Terhadap Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	7.355.411.000,-	7.322.245.529,-	99,55	117,73	18,26

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 3 dalam IKU Satpol P3KP yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum yang diukur dengan indikator sasaran persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM tercapai 117,73% dengan realisasi keuangan sebesar 99,55% maka terdapat efisiensi sebesar $(117,73/99,55-1) \times 100\% = 18,26\%$.

Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum merupakan indikator kinerja mandiri Satpol P3KP Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 3 sasaran yang menjadi target kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien.

Pencapaian sasaran 1, sasaran 2, dan sasaran 3, untuk realisasi anggaran 97,06%, rata-rata capaian kinerja sasaran 106,37, sehingga efisiensi dapat dihitung dari rata-rata realisasi capaian kinerja di bagi dengan rata-rata realisasi anggaran dikurangi 1 dikalikan 100%, hasilnya $(106,37/97,06-1) \times 100\% = 9,59\%$.

2) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP OPD.

Terdapat 6 (enam) kegiatan yang mendukung program ini yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi

umum perangkat daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya penanganan bencana kebakaran dengan indikator persentase penanganan bencana kebakaran.

Terdapat 4 (empat) kegiatan yang mendukung program ini yaitu kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, dan kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

3. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM.

Terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung program ini yaitu kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, dan kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satpol P3KP Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 13.335.528.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 12.942.951.706,- atau sebesar 97,06%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 9.132.044.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.020.450.236,- atau sebesar 98,78%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
	APBD KOTA PEKALONGAN	13.335.528.000,00	12.942.951.706,00	97,06%
A	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.112.132.000,00	4.755.994.112,00	93,03%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.647.000,00	7.635.500,00	99,85%
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.500.000,00	1.489.000,00	99,27%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	3.647.000,00	3.646.500,00	99,99%
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.260.934.000,00	3.979.951.470,00	93,41%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.203.484.000,00	3.922.501.470,00	93,32%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	55.800.000,00	55.800.000,00	100,00%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.500.000,00	14.750.000,00	84,29%
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	17.500.000,00	14.750.000,00	84,29%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	238.881.000,00	237.735.100,00	99,52%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500.000,00	7.477.000,00	99,69%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.385.000,00	26.191.000,00	99,26%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	10.000.000,00	9.790.500,00	97,91%
	Penyediaan bahan logistik kantor	97.000.000,00	96.610.600,00	99,60%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00	2.170.000,00	86,80%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	87.996.000,00	87.996.000,00	100,00%
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	131.620.000,00	120.191.576,00	91,32%
	Penyediaan jasa suart menyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.620.000,00	119.191.576,00	91,25%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.550.000,00	395.730.466,00	86,87%
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	436.550.000,00	376.775.466,00	86,31%
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	19.000.000,00	18.955.000,00	99,76%
B	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.355.411.000,00	7.322.245.529,00	99,55%
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.024.041.000,00	3.023.866.000,00	99,99%
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	125.200.000,00	125.200.000,00	100,00%
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	239.800.000,00	239.711.000,00	99,96%
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2.515.610.000,00	2.515.549.000,00	100,00%
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.131.000,00	13.106.000,00	99,81%
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00%
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	118.000.000,00	118.000.000,00	100,00%
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	300.000,00	300.000,00	100,00%
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.329.470.000,00	4.296.479.529,00	99,24%
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
	Bupati/Wali Kota			
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.314.470.000,00	4.281.479.529,00	99,24%
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00%
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	867.985.000,00	864.712.065,00	99,62%
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	696.300.000,00	693.613.565,00	99,61%
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.000.000,00	49.000.000,00	100,00%
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	607.600.000,00	605.127.065,00	99,59%
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	20.000.000,00	19.956.900,00	99,78%
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	7.145.000,00	7.145.000,00	100,00%
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	12.555.000,00	12.384.600,00	98,64%
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%
3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	74.403.000,00	73.818.000,00	99,21%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	34.836.000,00	34.836.000,00	100,00%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	39.567.000,00	38.982.000,00	98,52%
4	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	72.282.000,00	72.280.500,00	100,00%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada peristiwa yang Menimpa, Membahayakan dan/atau Mengancam Keselamatan Manuasi	72.282.000,00	72.280.500,00	100,00%

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Pada tahun 2023 tidak terdapat prestasi yang di peroleh Satpol P3KP Kota Pekalongan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023. Penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan tahun 2021-2026, pada tahun 2023 telah menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator nilai SAKIP OPD dengan target 73 dan realisasi 74 maka capaiannya adalah 101,37%.
2. Sasaran 2 meningkatnya penanganan bencana kebakaran terdiri dari 1 indikator, yaitu persentase penanganan bencana kebakaran dengan realisasi 100% dan target 100% maka capaian kinerja 100%.
3. Sasaran 3 meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum terdiri dari 1 indikator, yaitu persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM dengan realiasi 82,41 dimana target 70 maka tingkat capaian 117,73%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Satpol P3KP Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai target kinerja yang telah dicapai dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Satpol P3KP Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 13.335.528.000,- (Tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.942.951.706,- (Dua belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam rupiah) atau sekitar 97,06%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 SiLPA Satpol P3KP Kota Pekalongan sebesar Rp. 392.576.294,- (Tiga ratus Sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau sekitar 3%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan 2021-2026.

Pagu belanja Satpol P3KP Kota Pekalongan diluar belanja gaji dan tunjangan tahun 2022 sebesar Rp. 9.132.044.000,- (Sembilan miliar seratus tiga puluh dua juta empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 9.020.450.236,- (Sembilan miliar dua puluh juta empat ratus lima puluh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) atau 98,78%.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dibandingkan target kinerja tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa Satpol P3KP Kota Pekalongan efisien mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja sasaran dengan tingkat efisiensinya adalah $(106,37/97,06-1) \times 100\% = 9,59\%$.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol P3KP Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam membangun Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Satpol P3KP Kota Pekalongan serta langkah ke depan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan;
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparaturnya terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, serta pemadaman kebakaran;
3. Mengoptimalkan penegakan dan penanganan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pelayanan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran;
5. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi secara rutin;
6. Mengoptimalkan peran dan kinerja PPNS;
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (TNI dan Polri);
8. Mengaktifkan kembali partisipasi dan peran Kader Siaga Trantib (KST);

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Satpol P3KP yang sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja di masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

Pekalongan, 20 Februari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Pekalongan



SRIYANA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680709 199003 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRIYANA, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Walikota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 2 Oktober 2023

**Pihak Kedua,
Walikota Pekalongan**



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, SE

**Pihak Pertama,
Kepala Satpol PP, Damkar dan
Penyelamatan**

SRIYANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Unit Kerja: Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	70%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	64%
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran melalui program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	100%
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	73 Indeks
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 7.355.411.000,00	APBD
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 867.985.000,00	APBD
3. program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.112.132.000,00	APBD

Pekalongan, 02 Oktober 2023

Walikota Pekalongan

Kepala Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSEAN DJUNAID, SE

SRIYANA, S.Sos. M.Si
NIP. 19680709 199003 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKALONGAN

1. Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
3. Fungsi :
- a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
 - c. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
 - e. pembinaan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
 - f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparaturnya terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
 - i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas pelanggaran peraturan daerah;
 - j. pengarahannya penyelenggaraan administrasi umum meliputi: penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
 - k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
 - l. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
 - m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman kebakaran;
 - n. pengarahannya dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
 - o. pengarahannya dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
 - p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET						SUMBER DATA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta efektifitas penegakan perda	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	jumlah persentase (SOP yang disusun dibagi jumlah kebutuhan SOP sesuai tugas Satpol, jenis sarpras yang ada dibagi jenis kebutuhan sarpras berdasarkan SPM, jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti yang mendapatkan peningkatan kapasitas dibagi jumlah anggota satpol pp dan satlinmas ton inti, jumlah warga terdampak (mengalami kerugian materiil dan / cedera fisik) akibat penegakan hukum perda dan perkara yang mendapatkan ganti rugi dan / pengobatan dibagi jumlah warga yang terdampak akibat penegakan hukum perda dan perkara) dibagi 4 dikali 100 persen	persen	50	60	70	80	90	100	Satpol PP
2	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Persentase penanganan bencana kebakaran	jumlah bencana kebakaran yang ditangani dibagi jumlah bencana kebakaran dikali 100 persen	persen	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) yang dirilis Inspektorat pada tahun n	Indeks	70,00	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50	Inspektorat

Pekalongan, Januari 2022



PEKALONGAN, JANUARI 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
 PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
 KOTA PEKALONGAN

drg. AGUST MARHAENDAYAN, MM
 NIP. 19650814 199203 1 005